

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah pada 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024 berdasarkan empat indikator, yaitu: (1) perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tahun sebelumnya, (2) porsi PAD terhadap total pendapatan daerah, (3) porsi realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah, dan (4) porsi realisasi belanja barang terhadap total belanja daerah. Berdasarkan hasil analisis data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perkembangan Realisasi PAD Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Secara umum, perkembangan realisasi PAD pada 12 kabupaten di Sumatera Barat selama periode 2020–2024 bersifat fluktuatif namun cenderung meningkat. Penurunan terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai (86,82%), Kabupaten Agam (86,66%), dan Kabupaten Pasaman Barat yang baru pulih pada tahun berikutnya.

Memasuki tahun 2021 dan 2022, sebagian besar kabupaten menunjukkan pemulihan yang signifikan, di antaranya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mencatat capaian tertinggi sebesar 156,96% pada tahun 2022, serta Kabupaten Dharmasraya yang mencapai 130,40% pada tahun yang sama.

Pada periode 2023–2024, fluktuasi kembali terjadi pada beberapa kabupaten. Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan paling tajam pada tahun 2024 dengan capaian hanya 86,06%, sementara Kabupaten

Pesisir Selatan menunjukkan stabilitas yang paling konsisten dengan pertumbuhan PAD positif hampir di seluruh periode penelitian. Secara rata-rata, Kabupaten Padang Pariaman mencatatkan kinerja pertumbuhan PAD terbaik sebesar 107,57%, disusul Kabupaten Tanah Datar (104,67%) dan Kabupaten Pesisir Selatan (103,76%). Sementara itu, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat menjadi kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan PAD terendah karena fluktuasi yang tidak stabil sepanjang periode penelitian.

2. Porsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah

Seluruh kabupaten berada pada kategori kemampuan keuangan sangat rendah dengan pola hubungan instruktif berdasarkan kriteria kemandirian yang mengacu pada Halim (2007), di mana kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berada di bawah 25%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat masih sangat mendominasi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh kabupaten yang diteliti.

Kabupaten Tanah Datar mencatat rata-rata kontribusi PAD tertinggi sebesar 11,27%, diikuti oleh Kabupaten Pasaman Barat sebesar 10,63% dan Kabupaten Dharmasraya sebesar 10,44%. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki kontribusi PAD paling rendah dengan rata-rata hanya 4,96% selama periode penelitian, yang mencerminkan ketergantungan sangat tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Kondisi ini selaras dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa sebagian besar kabupaten di Sumatera Barat masih berada dalam kategori tingkat kemandirian rendah, di mana PAD belum mampu menjadi sumber pembiayaan yang mandiri bagi daerah.

3. Porsi Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah

Porsi realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah pada 12 kabupaten di Sumatera Barat selama periode 2020–2024 masih tergolong rendah dan belum merata. Secara rata-rata, proporsi belanja modal berada pada kisaran 9%–19% dari total belanja daerah. Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat rata-rata proporsi belanja modal tertinggi sebesar 18,56%, diikuti oleh Kabupaten Solok Selatan sebesar 18,45% dan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 14,73%.

Di sisi lain, Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Lima Puluh Kota mencatat proporsi belanja modal yang relatif lebih rendah dengan rata-rata masing-masing sebesar 10,37%, 10,62%, dan 11,22%. Tren belanja modal pada sebagian besar kabupaten menunjukkan pola yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Beberapa kabupaten mencatat peningkatan belanja modal pada tahun 2022–2023 sebagai dampak pemulihan pascapandemi, namun kembali menurun pada tahun 2024.

4. Porsi Realisasi Belanja Barang terhadap Total Belanja Daerah

Porsi realisasi belanja barang terhadap total belanja daerah pada 12 kabupaten di Sumatera Barat selama periode 2020–2024 tergolong cukup tinggi dan mendominasi struktur belanja daerah dibandingkan belanja modal. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki rata-rata proporsi belanja barang tertinggi sebesar 32,84%, disusul Kabupaten Dharmasraya sebesar 30,15% dan Kabupaten Solok Selatan sebesar 29,64%.

Sementara itu, Kabupaten Solok, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan mencatat rata-rata proporsi belanja barang yang relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya, dengan masing-masing sebesar 21,49%, 19,15%, dan 22,30%.

Secara umum, tingginya porsi belanja barang pada seluruh kabupaten yang diteliti mencerminkan bahwa APBD masih lebih dominan

digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan dibandingkan kegiatan pembangunan daerah.

5. Gambaran Keseluruhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Secara keseluruhan, kinerja keuangan pemerintah daerah pada 12 kabupaten di Sumatera Barat selama periode 2020–2024 belum menunjukkan kondisi yang optimal berdasarkan empat indikator yang dianalisis. Pertama, pertumbuhan PAD bersifat fluktuatif, terutama pada tahun 2020 yang dipengaruhi pandemi, dan belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten pada seluruh kabupaten. Kedua, tingkat kemandirian fiskal masih sangat rendah karena seluruh kabupaten berada dalam kategori instruktif dengan kontribusi PAD di bawah 25% terhadap total pendapatan daerah. Ketiga, proporsi belanja modal masih tergolong rendah dan belum stabil, sehingga investasi pembangunan infrastruktur daerah belum menjadi prioritas utama dalam struktur APBD. Keempat, proporsi belanja barang yang tinggi menunjukkan bahwa pengeluaran operasional masih mendominasi struktur belanja daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, namun peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yang perlu diungkapkan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

1. Keterbatasan Indikator Penelitian

Penelitian ini hanya menganalisis empat indikator kinerja keuangan daerah, yaitu rasio pertumbuhan PAD, rasio kemandirian, porsi belanja modal, dan porsi belanja barang. Indikator-indikator lain yang juga relevan dalam pengukuran kinerja keuangan daerah, seperti rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, rasio pertumbuhan ekonomi daerah, dan rasio

ketergantungan fiskal, tidak diikutsertakan dalam penelitian ini sehingga gambaran kinerja keuangan yang diperoleh belum sepenuhnya komprehensif.

2. Ruang Lingkup Terbatas pada Kabupaten

Penelitian ini hanya mencakup 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dan tidak memasukkan 7 kota yang juga berada di wilayah provinsi yang sama. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat karena karakteristik fiskal kota dan kabupaten pada umumnya berbeda secara signifikan.

3. Keterbatasan Data dan Akses Informasi Internal

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari portal DJPK Kementerian Keuangan. Penelitian ini tidak melakukan verifikasi langsung ke pemerintah daerah terkait keakuratan data maupun faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan realisasi PAD dan belanja daerah pada setiap tahun anggaran. Hal ini berpotensi membatasi kedalaman interpretasi terhadap hasil analisis yang dilakukan.

4. Pengaruh Kondisi Pandemi Covid-19

Periode penelitian yang mencakup tahun 2020–2024 meliputi masa pandemi Covid-19 yang merupakan kondisi luar biasa dan tidak berulang secara reguler. Kondisi ini menyebabkan data pada tahun 2020 cenderung tidak representatif sebagai kondisi normal pengelolaan keuangan daerah, sehingga interpretasi tren kinerja keuangan perlu mempertimbangkan konteks tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Saran bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah pada 12 kabupaten di Sumatera Barat perlu meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara konsisten dan berkelanjutan. Mengingat seluruh kabupaten masih berada dalam kategori kemandirian sangat rendah, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah yang lebih akurat, digitalisasi sistem pemungutan dan pembayaran pajak daerah, penguatan kinerja BUMD, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah yang dapat memperluas basis penerimaan PAD.

Pemerintah daerah disarankan untuk melakukan restrukturisasi alokasi belanja daerah dengan meningkatkan proporsi belanja modal secara bertahap dan terencana. Peningkatan belanja modal yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan efisiensi terhadap belanja barang agar pengeluaran operasional dapat dikendalikan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Khususnya bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki kontribusi PAD paling rendah namun proporsi belanja barang tertinggi, diperlukan perhatian khusus dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran. Kondisi geografis kepulauan

yang menjadi karakteristik daerah ini perlu diakomodasi dalam strategi peningkatan PAD dan alokasi belanja yang lebih produktif.

2. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan memasukkan seluruh 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat agar gambaran kinerja keuangan daerah lebih komprehensif dan perbandingan antara kabupaten dan kota dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

Peneliti selanjutnya dapat menambahkan indikator-indikator kinerja keuangan lainnya seperti rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, rasio ketergantungan fiskal, serta analisis pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) untuk memperkaya dimensi analisis dan memberikan gambaran kinerja keuangan daerah yang lebih lengkap dan mendalam.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan penelitian yang lebih komprehensif, misalnya dengan menggabungkan analisis kuantitatif dengan wawancara mendalam kepada pejabat pengelola keuangan daerah. Pendekatan ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah, di luar data numerik yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Peneliti selanjutnya juga dapat menganalisis keterkaitan antara kinerja keuangan daerah dengan capaian pembangunan manusia (Indeks Pembangunan Manusia/IPM) atau pertumbuhan ekonomi daerah guna menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih holistik.